

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada abad ke-17, Kota Surabaya memiliki pelabuhan terbesar di kawasan timur Hindia Belanda, menjadikannya pusat industri perkotaan yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai daerah sekaligus memicu berkembangnya aktivitas prostitusi dengan Gang Dolly sebagai kawasan paling terkenal hingga menjadi yang terbesar di Asia Tenggara (Lamijo, 2006). Adapun ketenaran Dolly telah menarik perhatian masyarakat lokal maupun pendatang untuk bekerja, berkunjung, atau berdagang guna memanfaatkan peluang ekonomi di keramaian yang ada. Akibatnya, Dolly menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar, ditandai dengan tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi, seperti pedagang makanan, penjual pakaian, jasa parkir, toko kelontong, layanan *laundry*, salon kecantikan, serta *spa*. Pola yang demikian menunjukkan bahwa keramaian Dolly memberikan dampak positif bagi perekonomian karena telah menjadi sumber penghidupan bagi penduduk di sekitar (Febriyanti dan Wisnu, 2023).

Meskipun Dolly memiliki keuntungan tertentu, Pemerintah Kota Surabaya di bawah pimpinan Walikota Tri Rismaharini resmi menutup Dolly pada 14 Juni 2014. Penutupan tersebut telah berdampak langsung pada keberlangsungan perekonomian warga yang sebelumnya telah menggantungkan penghidupan pada aktivitas ekonomi yang berkembang di keramaian prostitusi Dolly, sebagaimana diungkapkan oleh Lion et al. (2021), di mana usaha warga setempat mengalami

penurunan omset lebih dari 50% akibat berkurangnya jumlah pengunjung setelah Dolly di lokalisasi.

Menurut Lamijo (2006), terdapat banyak upaya pemberantasan prostitusi di Jakarta yang gagal karena pendekatan yang digunakan bersifat instan sehingga tidak menyentuh masalah mendasar tanpa adanya solusi jangka panjang, yakni menyediakan ganti rugi berupa pemberian lapangan kerja. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Surabaya berusaha menghindari kegagalan lokalisasi Dolly dengan menyediakan pekerjaan alternatif bagi warga terdampak, sebagaimana terdapat dalam liputan6.com (2014), di mana warga usia produktif diberikan kontrak kerja untuk bergabung di sejumlah SKPD Pemkot Surabaya, seperti menjadi anggota Satpol PP, Linmas, dan staf administrasi.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan pendampingan pendirian usaha bagi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada prostitusi Dolly, dengan tujuan membantu memperoleh sumber penghidupan baru setelah lokalisasi. Upaya tersebut sesuai dengan amanat Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan; Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 460/15612/031/2011 tentang Penganganan Lokasi Lokalisasi Wanita Tuna Susila di Jawa Timur; dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 460/7705/031/2014 tentang Penanganan dan Pasca Penutupan Lokalisasi Wanita Tuna Susila di Jawa Timur, di mana diinstruksikan bagi walikota dan bupati di wilayah Jawa Timur untuk menutup semua lokasi prostitusi tanpa melakukan

relokasi, namun menggantikan relokasi dengan memberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat (Amalia, 2018).

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi daerah, seperti potensi alam dan sumber daya manusia agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Adapun langkah yang dapat dilakukan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang menekankan pentingnya pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bahwa UKM merupakan usaha ekonomi produktif yang terdiri dari usaha kecil dan menengah. Sedangkan, pengembangan UKM merujuk pada upaya yang melibatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha (bisnis), serta masyarakat dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, pendampingan, serta bantuan penguatan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kapasitas serta daya saing UKM.

Adapun UKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian, sebagaimana diungkapkan oleh Aji *et al.* (2023), di mana UKM menjadi tulang punggung perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan karena dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan daripada perusahaan besar. Data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur (2022),

menunjukkan bahwa keberadaan UKM telah berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah bruto sebesar Rp215.364 triliun yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebanyak 20,803 juta dari 21,610 juta atau 96,3% jumlah pekerja di Jawa Timur bekerja di sektor koperasi dan UKM, dengan Kota Surabaya menjadi daerah kotamadya dengan jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur. Adapun distribusi UMKM di Kota Surabaya disajikan secara rinci pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya**

| No  | Kecamatan        | Jumlah |
|-----|------------------|--------|
| 1.  | Asemrowo         | 1.995  |
| 2.  | Benowo           | 4.369  |
| 3.  | Bubutan          | 2.419  |
| 4.  | Bulak            | 3.565  |
| 5.  | Dukuh Pakis      | 2.329  |
| 6.  | Gayungan         | 2.737  |
| 7.  | Genteng          | 5.497  |
| 8.  | Gubeng           | 5.681  |
| 9.  | Gunung Anyar     | 2.557  |
| 10. | Jambangan        | 5.300  |
| 11. | Karangpilang     | 3.344  |
| 12. | Kenjeran         | 3.779  |
| 13. | Krembangan       | 2.462  |
| 14. | Lakarsantri      | 2.802  |
| 15. | Mulyorejo        | 3.991  |
| 16. | Pabean Cantian   | 1.272  |
| 17. | Pakal            | 4.084  |
| 18. | Rungkut          | 5.300  |
| 19. | Sambikerep       | 1.962  |
| 20. | Sawahan          | 6.936  |
| 21. | Semampir         | 2.593  |
| 22. | Simokerto        | 2.418  |
| 23. | Sukolilo         | 6.899  |
| 24. | Sukomanunggal    | 2.800  |
| 25. | Tambaksari       | 6.478  |
| 26. | Tandes           | 4.652  |
| 27. | Tegalsari        | 2.324  |
| 28. | Tenggilis Mejoyo | 2.651  |

| No     | Kecamatan | Jumlah  |
|--------|-----------|---------|
| 29.    | Wiyung    | 2.233   |
| 30.    | Wonocolo  | 3.307   |
| 31.    | Wonokromo | 5.982   |
| Jumlah |           | 114.718 |

Sumber: Dinkopdag Kota Surabaya (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tercatat terdapat 114.718 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan, meliputi bidang mamin (makanan dan minuman), *fashion*, kerajinan, dan industri olahan rumah tangga. Adapun tersebut berkembang sebagai hasil dari program pemberdayaan masyarakat, begitu pula di eks lokalisasi Dolly.

Pemerintah Kota Surabaya secara aktif membina warga terdampak di eks lokalisasi Dolly. Setelah penutupan lokalisasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya melaksanakan berbagai program pemberdayaan usaha berbasis pangan bagi masyarakat terdampak, seperti produksi telur asin, bothok, tempe, batik, sosis, keripik, aksesoris, sepatu, sandal, minyak rambut, susu, dan minuman segar (Soewarno *et al.*, 2023). Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A), sebagaimana dalam jumpa pers bersama tribunjatim.com (2017), selama tahun 2013 hingga 2016, mencatat sebanyak 1.125 warga dari kawasan eks lokalisasi Dolly telah mengikuti pelatihan keterampilan pada empat bidang utama, yakni memasak, menjahit, membatik, dan pembuatan kerajinan tangan (*handycraft*).

Tidak hanya pemberdayaan, dilansir dari SINDONews (2014), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan dukungan pengembangan UKM dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk membeli sejumlah wisma yang dijual oleh pemiliknya untuk selanjutnya dialihfungsikan menjadi fasilitas

umum yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pusat belajar, balai pertemuan, serta pasar atau sentra kuliner, sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.1 di bawah:



**Gambar 1. 1 Alih Fungsi Bekas Wisma oleh Pemerintah Kota Surabaya**

Sumber: Dokumentasi penulis (Oktober, 2024)

Merujuk pada gambar 1.1, bangunan bekas wisma di Gang Dolly telah mengalami perubahan fungsi, salah satunya menjadi pasar burung (kiri). Sementara itu, bekas wisma prostitusi terbesar di Gang Dolly yakni Wisma Barbara, telah diubah menjadi gedung serbaguna yang meliputi ruang industri dan ruang pameran produk khas eks lokasi Dolly (kanan).

Selain dukungan dari pemerintah, terdapat pula peran aktif dari komunitas sosial, Gerakan Melukis Harapan (GMH), yang berdiri seiring dengan lokasi Dolly. Sejak Dolly di lokasi, GMH secara konsisten melakukan pendampingan bagi warga terdampak untuk berwirausaha, sebagaimana terdapat pada gambar 1.2 di bawah:



**Gambar 1. 2 Pelatihan Membuat Batik oleh GMH**

Sumber: Dokumentasi Gerakan Melukis Harapan (2016)

Pada gambar di 1.2 di atas, GMH memberikan pendampingan berupa pelatihan membuat batik bagi warga terdampak. Program yang dijalankan oleh GMH mencakup pelatihan, pembentukan, serta pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang mana telah berhasil membantu warga terdampak dalam merintis serta mengembangkan usaha mereka di sektor UKM. Adapun UKM yang tumbuh dengan binaan dari GMH, diantaranya UKM Tempe Bang Jarwo, UKM Oseki, UKM Batik Jarak Arum, UKM Samijali, UKM Katering Dolly (Savitri et al., 2018).

Menurut Wulansari et al. (2024), komunitas atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) berperan dalam meningkatkan produksi, mengembangkan UKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dilansir dari jawapos.com (2022), POKDARWIS Sobo Dolly berperan aktif dalam mengembangkan UKM di eks lokasi Dolly yakni dengan cara menyelenggarakan tur wisata yang mengenalkan perubahan Dolly dari lokasi menjadi kawasan produktif berbasis UKM. Dalam pelaksanaannya, POKDARWIS Sobo Dolly bekerja sama dengan lima UKM di eks lokasi Dolly, yaitu UKM KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mampu Jaya, Tempe Bang Jarwo, UKM Batik, UKM Keripik, dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dolly, di mana pengunjung dapat melihat langsung proses produksi berbagai produk UKM sekaligus mendorong pemasaran produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, POKDARWIS Sobo Dolly turut melakukan promosi UKM melalui media sosial *Instagram*, yakni pada akun @wayahendolly.

Dukungan terhadap UKM di eks lokalisasi Dolly juga berasal dari sektor swasta. Berdasarkan laman Pusat Oleh-Oleh Surabaya Patata, komitmen dalam mendukung UKM di eks lokalisasi Dolly diwujudkan melalui kerja sama yang bertujuan menjaga kelangsungan usaha yang ada. Surabaya Patata juga secara aktif mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal UKM eks lokalisasi Dolly yang tengah bertransformasi menuju citra yang lebih positif.

Berbagai dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak telah mendorong perkembangan UKM di eks lokalisasi Dolly pada berbagai bidang usaha (Supriyanto dan Iskandar, 2022). Sebagaimana terangkum dalam media daring DetikJatim, Atik Triningsing, selaku Ketua Koordinator UKM KUB Mampu Jaya, mengungkapkan bahwa dukungan dalam bentuk pelatihan dan kerja sama telah dalam mempertahankan keberlangsungan kelompok usaha yang dikelolanya, tercermin dalam pernyataan berikut:

Surabaya (detik.com) - "Atik menceritakan, dulunya setelah lokalisasi Dolly ditutup, tahun 2014 diadakan pelatihan usaha yang diikuti sekitar 30 orang. Mereka mengikuti pelatihan hingga membuat produk. Namun butuh mental yang kuat untuk bertahan. Dari 30 orang yang ikut pelatihan, hingga kini tersisa 3 yang masih bertahan. Diantaranya Atik dan Ida Aryani (51) yang juga warga terdampak lokalisasi. Ketiganya berjuang bersama dan bisa *survive*. Di bekas wisma Barbara ini, ada beberapa usaha yang tergabung dalam KUB Mampu Jaya, seperti sepatu, sandal dan slipper hotel. Atik sendiri memiliki usaha membuat slipper hotel, bahkan sudah ada 70 hotel yang bekerja sama dengan UMKM-nya. "Sebulan mulai sandal sepatu mestinya (omset) Rp 5 hingga Rp 10 juta. Alhamdulillah. Kalau sehari *slipper* (pesanan) ada 2 hotel, per hotel 1.000 jadi 2.000 pasang slipper. Kadang-kadang kita ngerjain 2 hari dalam berkelompok. 1 kelompok 5-6 hotel untuk sandal hotel. Kelompoknya sendiri-sendiri (sepatu dan *slipper*) tapi satu pintu," jelasnya." (Sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6134265/transformasi-wajah-dolly-warga-terus-berusaha-produktif-melalui-umkm>) Diakses pada 7 Oktober 2024

Dapat diketahui bahwasanya keberadaan UKM khususnya di eks lokalisasi

Dolly memiliki dampak dalam menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar

sehingga mendorong sektor ekonomi masyarakat dengan usaha yang bersih. Keberadaan UKM juga berkontribusi dalam membangun citra baru kawasan Dolly, sebagaimana ada pada gambar 1.4 berikut:



**Gambar 1. 3 Suasana Gang Dolly Saat Ini**

Sumber: Dokumentasi penulis (Oktober, 2024)

Berdasarkan gambar 1.4, kondisi Gang Dolly saat ini tampak bersih sehingga terasa bernuansa positif dengan warna-warni yang menciptakan kesan segar. Dahulu dikenal dengan stigma negatif, kini telah bertransformasi menjadi area yang lebih produktif dengan kegiatan positif. Namun, di tengah berkembangnya ekonomi di eks lokasi Dolly, terdapat sisi memprihatinkan, yakni menurunnya UKM milik warga eks lokasi Dolly, ditunjukkan dalam gambar 1.5 berikut:



**Gambar 1. 4 Kondisi Memprihatinkan SWK Dolly dan DSP**

Sumber: Dokumentasi penulis (Oktober, 2024)

Berdasarkan gambar 1.5, Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dolly (gambar kiri) tampak dalam kondisi yang cukup sepi. Salah satu pemilik UKM di kawasan Dolly mengungkapkan situasi tersebut pada media daring, yakni:

Surabaya (kumparan.com) - "Sepi saiki SWK mbak, wong rawonku ae sekarang nggak jualan di situ lagi. Memang masih ada yang jualan di situ tapi cuma beberapa orang saja," terang Jarwo." (Sumber: <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/miris-sejumlah-umkm-di-kawasan-eks-lokalisasi-dolly-gulung-tikar-220HV8smjHR/full>) Diakses pada 7 Oktober 2024.

Nasib miris juga dialami oleh Dolly Saiki *Point* (DSP) (gambar kanan) yang merupakan pusat penjualan produk UKM eks lokasi Dolly, di mana operasionalnya telah dihentikan hingga bangunannya dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan (Kumparan, 2024). Padahal, pada tahun 2023, Universitas Surabaya (UBAYA) telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di eks lokasi Dolly dengan menciptakan logo baru bagi DSP sebagai bagian dari strategi *rebranding* guna mendukung UMKM di area tersebut (Setyawan *et al.*, 2023).

Melemahnya sentra penjualan produk unggulan UKM eks lokasi Dolly mencerminkan adanya persaingan usaha yang ketat, menuntut para pelaku usaha perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Menurut Lisnawati (2024), dalam mengatasi permasalahan lemahnya UKM adalah dengan meningkatkan keterlibatan UKM dalam ekosistem pasar digital. Namun, dapat diketahui pula bahwa hambatan yang dihadapi pelaku usaha adalah minimnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital (Suwarni *et al.*, 2019). Berdasarkan studi Ariawantara *et al.* (2021), disebutkan bahwa kemampuan dan kapasitas masyarakat di eks lokasi Dolly tidak dapat disamakan dengan individu yang melek digital sehingga kiprah UKM Dolly di pasar digital tidaklah mudah.

Menurut Agustina et al. (2014), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UKM, diperlukan pengembangan yang melibatkan kolaborasi intensif berbagai aktor. Hal serupa diungkapkan oleh Guimarães et al. (2021), di mana dijelaskan bahwa kolaborasi antar organisasi dapat memberikan dampak signifikan dalam memperkuat UKM, asalkan setiap pihak saling terhubung dan berinteraksi untuk mengoptimalkan pengembangan UKM.

Pemerintah sering menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti swasta, masyarakat, dan komunitas, serta lainnya (Noor *et al.*, 2022; Emerson *et al.*, 2012). Dalam mendukung pengembangan UKM di eks lokasi Dolly, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidaklah cukup. Dukungan dari berbagai pihak lainnya juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengembangan.

Menurut Beatrice dan Hertati (2023), dalam pengembangan UKM diperlukan keterlibatan lima aktor, meliputi akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa, atau dikenal sebagai model kolaborasi *pentahelix*. Adapun Yunas (2019), mengungkapkan bahwa setiap aktor dalam kolaborasi *pentahelix* memiliki peran yang saling melengkapi untuk mendukung pengembangan UKM, yakni akademisi berperan sebagai konseptor, bisnis sebagai *enabler*, komunitas sebagai akselerator, pemerintah sebagai regulator sekaligus kontroler, dan media sebagai *expander*.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Iskandar (2022) mengenai, “Implementasi Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Eks Lokasi Dolly pada Masa Pandemi Covid-19

(Studi Kasus DS. Point,”), menunjukkan bahwa peran para aktor dalam model *pentahelix* telah berjalan dengan cukup baik. Namun, menurut Rachim et al. (2020), model *pentahelix* belum sepenuhnya merepresentasikan peran pemangku kepentingan secara menyeluruh, karena masih terdapat aktor penting yang belum terpetakan. Oleh karenanya, Zakaria et al. (2019), telah mengembangkan model *pentahelix* menjadi *hexahelix* dengan menambahkan aktor hukum dan regulasi, di mana hukum dan regulasi merujuk pada penerapan kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan atau regulasi guna memberikan kepastian hukum sehingga setiap aktivitas yang terkait dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Yudithia *et al.* (2024), menjelaskan bahwa keberadaan aktor hukum atau regulasi dalam model *hexahelix* berperan untuk memberikan perlindungan hukum, memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan aturan yang jelas, serta mendukung pengelolaan potensi peningkatan perekonomian secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Firmansyah et al. (2022), berpendapat bahwa model *hexahelix* dapat menjadi solusi dalam pemulihan perekonomian nasional melalui sinergi multi-aktor yang mendorong percepatan program-program pembangunan.

Aktor hukum dan regulasi dalam penelitian ini mengacu pada aspek perizinan UKM. Adapun UKM di Kota Surabaya yang memiliki perizinan, disajikan dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2 Bentuk Izin Usaha Kecil dan Menengah di Kota Surabaya**

| No. | Jenis Izin                          | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1.  | Sertifikat Halal MUI/BPOM/PIRT      | 486    |
| 2.  | Nomor Induk Berusaha (NIB)          | 1.491  |
| 3.  | Izin Usaha Industri (IU)            | 652    |
| 4.  | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 1.321  |

| No. | Jenis Izin       | Jumlah |
|-----|------------------|--------|
| 5.  | Izin Usaha Tetap | 80     |
|     | Jumlah           | 4.030  |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data dalam tabel 1.2 di atas, tercatat bahwa sebanyak 4.030 UKM di Kota Surabaya telah berbadan hukum, dengan rincian 486 usaha memiliki sertifikat halal MUI/BPOM/PIRT, 1.491 telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), 652 memiliki Izin Usaha Industri (IU), 1.321 terdaftar dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan 80 usaha memiliki Izin Usaha Tetap. Data tersebut menunjukkan bahwa UKM di Surabaya yang telah memiliki payung hukum masih terbatas, menunjukkan bahwa tingkat legalitas UKM di kota ini belum optimal, sehingga diperlukan upaya penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi (Siregar et al., 2023).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bahwa setiap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) wajib memiliki perizinan usaha, yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan/atau izin usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. perizinan tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme elektronik, dengan pemerintah pusat atau daerah memberikan pembinaa atau pendampingan guna mempermudah pelaku usaha dalam merolehan izin usaha.

Dengan berkembangnya UKM di eks lokalisasi Dolly, pelaku usaha diharapkan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut

Nugroho (2017), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya telah mendampingi UKM di eks lokasi Dolly untuk lebih sadar hukum. Upaya dilakukan dengan mendorong para pelaku UKM untuk memenuhi persyaratan legalitas yang berfungsi sebagai payung dalam menjamin kepastian hukum (Nugroho, 2017).

Adapun penelitian mengenai kolaborasi *hexahelix* telah banyak dilakukan, namun kajian mengenai pengembangan UKM jarang ditemui. Oleh karenanya, penulis memilih judul, "Kolaborasi *Hexahelix* dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Eks Lokasi Dolly," adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai keterlibatan aktor kolaborasi *hexahelix* yang diperankan oleh aktor akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan hukum dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di eks lokasi Dolly.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana keterlibatan dan peran aktor Kolaborasi *Hexahelix* dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Eks Lokasi Dolly?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai keterlibatan dan peran aktor Kolaborasi *Hexahelix* dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Eks Lokasi Dolly.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan memperkaya khasanah bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai kolaborasi aktor model *hexahelix* dalam pengembangan UKM di eks lokalisasi Dolly.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi refleksi bagi aktor model *hexahelix* yang terlibat dalam pengembangan UKM guna meningkatkan pemberdayaan di eks lokalisasi Dolly melalui kolaborasi yang lebih sinergis di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi eks lokalisasi atau lokalisasi yang akan ditutup untuk dikembangkan melalui pemberdayaan UKM.